



**LAPORAN TINGKAT PEMENUHAN
ACGS
PT ABM INVESTAMA TBK.**

Laporan Review Pemenuhan ACGS

No. Ref: R/001.RAS/ais/2018

Dewan Komisaris dan Direksi

PT ABM Investama Tbk.

Gedung TMT 1, 18th Fl, Suite 1802

Jl Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560

Kami telah melakukan review terhadap pengungkapan praktik tata kelola PT ABM Investama Tbk. ("ABM Investama"), sesuai dengan surat penunjukan kerjasama No. ABM-BOD/203/SPO/X/2017, dengan menggunakan kriteria pengungkapan praktik tata kelola ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dipublikasikan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) pada bulan Mei 2017.

Berdasarkan review atas pengungkapan praktik tata kelola yang diharapkan untuk negara anggota ASEAN, ABM Investama telah menerapkan 75% dari standar minimum yang diharapkan untuk diterapkan, seperti tersaji dalam tabel di bawah.

Aspek Review	Standar Minimum yang Diharapkan			
	Item	N/A	Diterapkan	
Right of Shareholder	21	2	14	74%
Equitable Treatment of Shareholders	15	3	8	67%
Role of Stakeholders	13	-	11	85%
Disclosure and Transparency	32	-	25	78%
Responsibility of the Board	65	-	47	72%
Total	146	5	105	75%

Kami juga menemui adanya praktik baik di ABM Investama yang melebihi standar minimal yang diharapkan, yaitu keberadaan dan pengungkapan kebijakan terkait keberagaman anggota Direksi dan Dewan Komisaris (Board Diversity). Informasi lebih lengkap mengenai area pemenuhan dan perbaikan disajikan dalam laporan kami.

Review dilakukan dengan menggunakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum seperti laporan tahunan, website Emiten, pengumuman dan edaran. Informasi yang digunakan hanya informasi dalam Bahasa Inggris. Kami tidak melakukan validasi atas seluruh informasi yang digunakan dalam pelaksanaan review ini. Manajemen ABM Investama bertanggung jawab memastikan bahwa informasi yang diungkapkan kepada publik adalah benar, akurat, dan mutakhir. Kami yakin bahwa review kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan kesimpulan. Namun demikian, kesimpulan kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan ABM Investama terhadap persyaratan tertentu.

Secara umum, kami berkesimpulan bahwa ABM Investama telah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan mengungkapkan praktik tersebut di dalam Laporan Tahunan dan website Perusahaan.

Walaupun pemenuhan referensi praktik baik yang digunakan dalam review ini tidak bersifat wajib, namun praktik tersebut merupakan rekomendasi yang baik untuk perusahaan publik dalam lingkup pengaturan dan pelaporan. Keputusan untuk menerapkan rekomendasi tertentu sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen perusahaan, namun ABM Investama perlu mempertimbangkan untuk menerapkan praktik baik tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan kriteria ACGS yang dipublikasikan oleh ACMF sebagai bagian dari komunitas ASEAN.

Jakarta, 29 Januari 2018



RSM Indonesia Konsultan

Angela Indirawati Simatupang
Partner

Daftar Isi

1. PENDEKATAN PEKERJAAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Metodologi Pekerjaan	1
1.2.1. Pendekatan Umum Pekerjaan	1
1.2.2. Pendekatan Spesifik Pekerjaan	2
2. PELAKSANAAN PEKERJAAN	2
2.1. Penilaian atas Tingkat Pemenuhan ACGS	2
2.1.1. Pelaksanaan Penilaian	2
2.1.2. Penerapan Kriteria ACGS	2
2.1.3. Hasil Penilaian Pemenuhan Kriteria ACGS	5
2.1.4. Rangkuman Area Perbaikan ACGS	8
2.1.5. Peraturan OJK atas Kriteria ACGS Yang Belum Dipenuhi	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Metodologi RSM Indonesia	1
Gambar 2. Pendekatan Spesifik Pekerjaan	2

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kriteria ACGS	2
Tabel 2. Jumlah Kriteria per Aspek	3
Tabel 3. Hasil Penilaian ACGS	6
Tabel 4. Detail Area Perbaikan	8
Tabel 5. Peraturan OJK atas kriteria ACGS yang belum dipenuhi	23

1. PENDEKATAN PEKERJAAN

1.1. Latar Belakang

PT ABM Investama Tbk. telah menunjuk PT RSM Indonesia Konsultan (RSM Indonesia) untuk memberikan jasa konsultasi GCG periode 2017 sesuai dengan surat penunjukan kerja sama No. ABM-BOD/203/SPO/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017.

Ruang lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut:

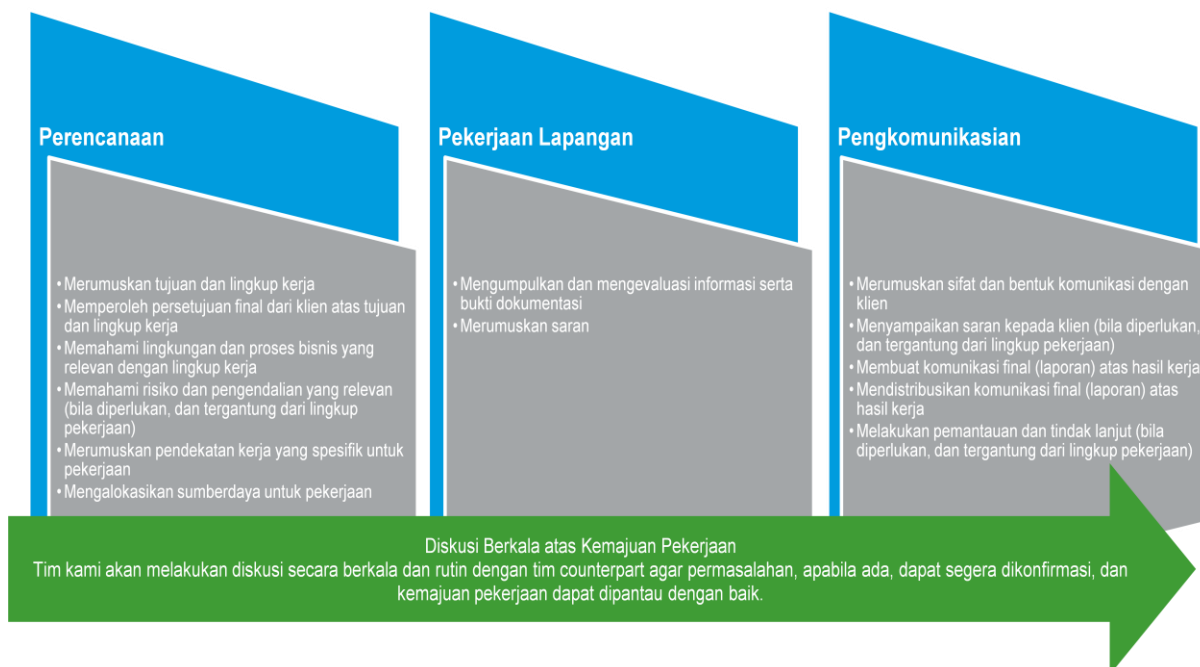
- Melakukan identifikasi pengungkapan informasi berdasarkan kriteria ACGS.
- Menyusun ikhtisar hasil penilaian.

Pekerjaan dilakukan dari bulan Oktober sampai Desember 2017.

1.2. Metodologi Pekerjaan

1.2.1. Pendekatan Umum Pekerjaan

Pekerjaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kerja yang terbagi dalam 3 tahapan, yaitu perencanaan, pekerjaan lapangan, dan pengkomunikasian.



Gambar 1. Metodologi RSM Indonesia

1.2.2. Pendekatan Spesifik Pekerjaan

Dengan menggunakan pendekatan umum pekerjaan, disusun 1 aktivitas utama dalam melaksanakan pekerjaan, yaitu:



Gambar 2. Pendekatan Spesifik Pekerjaan

2. PELAKSANAAN PEKERJAAN

2.1. Penilaian atas Tingkat Pemenuhan ACGS

2.1.1. Pelaksanaan Penilaian

- Melakukan koordinasi dengan tim counterpart ABM Investama.
- Penilaian atas kesesuaian dan kecukupan pengungkapan informasi dilakukan dengan menggunakan kriteria ACGS yang dipublikasikan oleh ASEAN Capital Market Forum pada bulan Mei 2017.
- Penilaian dilakukan hanya atas informasi yang diungkapkan dan/atau tersedia untuk publik.

2.1.2. Penerapan Kriteria ACGS

Kriteria ACGS yang digunakan sebagai dasar penilaian meliputi 7 aspek ACGS. Berikut adalah jumlah total kriteria per masing-masing aspek:

Tabel 1. Kriteria ACGS

Aspek ACGS	Total Kriteria
A. Right of Shareholder	21
B. Equitable Treatment of Shareholders	15
C. Role of Stakeholders	13
D. Disclosure and Transparency	32
E. Responsibility of the Board	65
Bonus	13
Penalty	25

Pada masing-masing bagian terdapat sub-area, sehingga jumlah total kriteria adalah sebanyak 184.

Tabel 2. Jumlah Kriteria per Aspek

A. Right of Shareholders		B. Equitable Treatment of Shareholders		C. Role of Shareholders	
	Item		Item		Item
1. Rights of Shareholders	1	1. Shares and voting rights	2	1. The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.	7
2. Right to participate in decisions concerning fundamental corporate changes	3	2. Notice of AGM	5	2. Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.	1
3. Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, incl. voting procedures, that govern general shareholder meetings.	15	3. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.	2	3. Performance-enhancing mechanisms for employee participation should be permitted to develop	3
4. Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner	1	4. Related party transactions by directors and key executives.	4	4. Stakeholders including individual employee & their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this.	2
5. The exercise of ownership rights by all shareholder, incl. institutional investors, should be facilitated.	1	5. Protecting minority shareholders from abusive actions	2		

D. Disclosure & Transparency	
	Item
1. Transparent ownership structure	5
2. Quality of Annual Report	8
3. Disclosure of related party transactions (RPT)	2
4. Directors and commissioners dealings in shares of the company	1
5. External auditor and Auditor Report	2
6. Medium of communications	4
7. Timely filing/release of annual/financial reports	3
8. Company website	6
9. Investor relations	1

Bonus	
	Item
A.1. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.	1
B.1. Notice of AGM	1
C.1. The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.	1
D.1. Transparent ownership structure	2
E.1. Board Competencies and Diversity	2
E.2. Board Structure	2
E.3. Board Appointments and Re-Election	1
E.4. Board Structure & Composition	1
E.5. Risk Oversight	1
E.6. Board Performance	1

E. Responsibilities of the Board	
	Item
1. Board Duties and Responsibilities	6
2. Board Structure	24
3. Board Processes	22
4. People on the Board	6
5. Board Performance	7

Penalty	
	Item
A.1. Basic shareholder rights	1
A.2. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse.	1
A.3. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.	2
A.4. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.	3
A.5. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.	1
B.1. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.	1
B.2. Protecting minority shareholders from abusive action.	2
C.1. The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.	1

C.2. Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.	1
D.1. Sanctions from regulator on financial reports.	4
E.1. Compliance with listing rules, regulations and applicable laws.	2
E.2. Board Structure.	3
E.3. External Audit	1
E.4. Board Structure and Composition	2

2.1.3. Hasil Penilaian Pemenuhan Kriteria ACGS

Secara umum gambaran penerapan kriteria ACGS adalah sebagai berikut:

Level 1	Standar Minimum yang Diharapkan			
Aspek Review	Item	N/A	Diterapkan	
Right of Shareholder	21	2	14	74%
Equitable Treatment of Shareholders	15	3	8	67%
Role of Stakeholders	13	-	11	85%
Disclosure and Transparency	32	-	25	78%
Responsibility of the Board	65	-	47	72%
Total	146	5	105	75%

Level 2 – Bonus Items	Melebihi Standar Minimum		
Aspek Review	Item	Diterapkan	
Right of Shareholder	1	-	0%
Equitable Treatment of Shareholders	1	-	0%
Role of Stakeholders	1	-	0%
Disclosure and Transparency	2	-	0%
Responsibility of the Board	8	1	13%
Total	13	1	8%

Level 2 – Penalty Items	Di bawah Standar Minimum		
Aspek Review	Item	Diterapkan	
Right of Shareholder	8	1	13%
Equitable Treatment of Shareholders	3	-	0%
Role of Stakeholders	2	-	0%
Disclosure and Transparency	4	-	0%
Responsibility of the Board	8	-	0%
Total	25	1	4%

Berdasarkan hasil penilaian, kami menemukan beberapa informasi, yaitu:

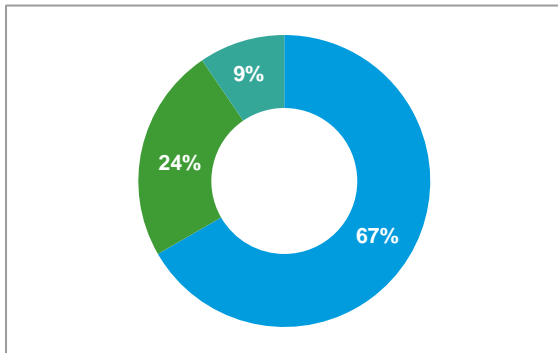
- Telah diungkapkan atau praktik sesuai kriteria (Ya);
- Belum diungkapkan atau telah diungkapkan namun belum sesuai dan/atau belum cukup untuk menjawab kriteria ACGS (Tidak); dan
- Tidak terdapat praktik di periode pengujian (N/A).

Berikut adalah jumlah kriteria yang masih perlu dilakukan perbaikan per masing-masing aspek:

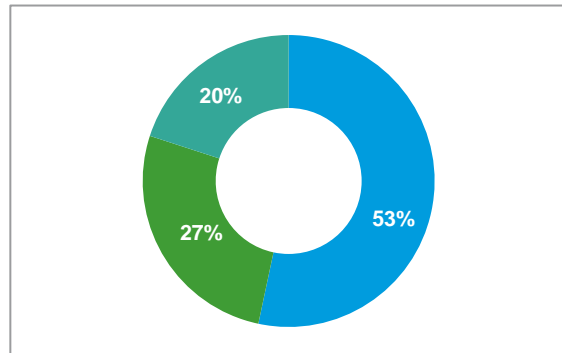
Tabel 3. Hasil Penilaian ACGS

Aspek ACGS	Total Kriteria	Hasil Pengujian		
		Ya	Tidak	N/A
A. Right of Shareholder	21	14	5	2
B. Equitable Treatment of Shareholders	15	8	4	3
C. Role of Stakeholders	13	11	2	-
D. Disclosure and Transparency	32	25	7	-
E. Responsibility of the Board	65	47	18	-
Bonus	13	1	12	-
Penalty	25	1	24	-

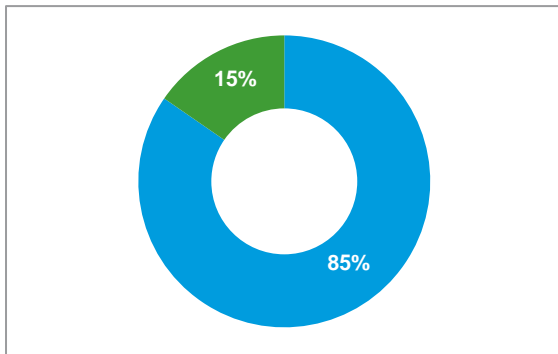
PART A - Right of Shareholder



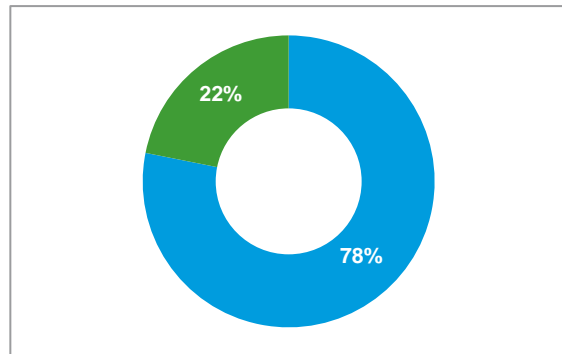
PART B - Equitable Treatment of Shareholders



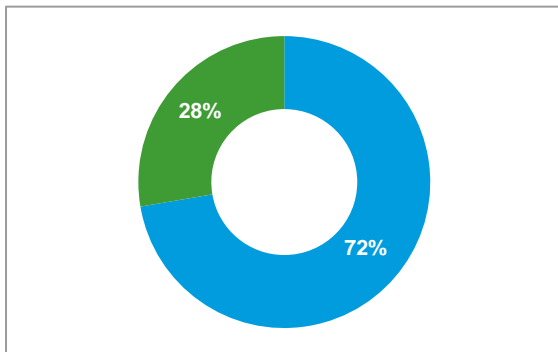
PART C - Role of Stakeholders



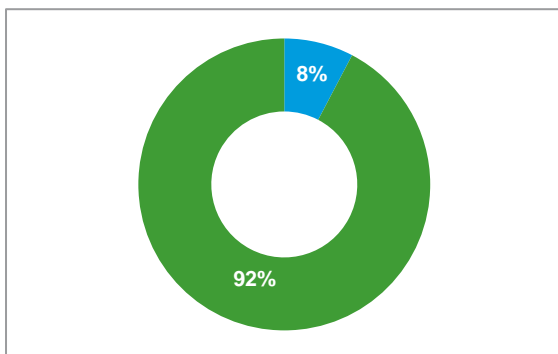
PART D - Disclosure and Transparency



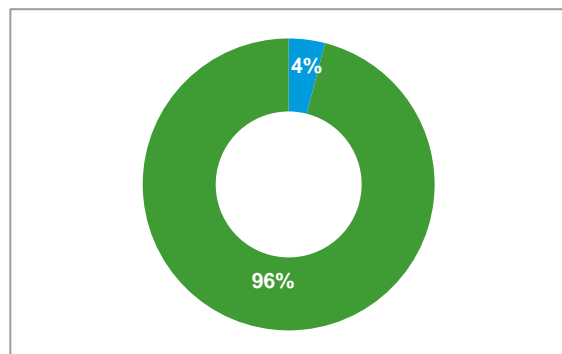
PART E - Responsibility of the Board



Bonus



Penalty



Yes No N/A

2.1.4. Rangkuman Area Perbaikan ACGS

Berikut adalah detail area perbaikan dan rekomendasi per kriteria:

Tabel 4. Detail Area Perbaikan

No.	Kriteria	Penjelasan	Rekomendasi
Part A – Rights of Shareholders			
1	A.3.1 Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/ commissioners?	Pengumuman RUPS 2017 belum menginformasikan nilai total remunerasi Dewan Komisaris yang memerlukan persetujuan RUPS.	Total remunerasi Dewan Komisaris yang diajukan untuk disetujui Pemegang Saham serta penjelasannya diungkapkan dalam Pengumuman RUPS.
2	A.3.10 Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	Risalah RUPS 2017 hanya menginformasikan seluruh keputusan RUPS diambil berdasarkan konsensus.	Mekanisme pengambilan keputusan RUPS yaitu vote by poll untuk masing-masing agenda diungkapkan dalam Risalah RUPS.
3	A.3.11 Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/ inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	Risalah RUPS 2017 tidak menginformasikan pihak independen yang ditunjuk untuk melakukan perhitungan dan validasi pengambilan suara.	Pihak independen ditunjuk untuk melakukan perhitungan dan validasi pengambilan suara di RUPS. Informasi pihak independen tersebut disampaikan di dalam Risalah RUPS.
4	A.3.14 Does the company provide	Pengumuman RUPS 2017 tidak memuat penjelasan	Penjelasan atas masing-masing

No.	Kriteria	Penjelasan	Rekomendasi
	the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?	atas masing-masing agenda RUPS, kecuali atas agenda 3.	agenda RUPS, untuk membantu Pemegang Saham dalam memahami setiap agenda RUPS yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, dilampirkan di dalam Pengumuman RUPS.
5	A.4.1 In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring shareholders' approval, does the board of directors/ commissioners of the company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	Laporan Tahunan tidak menginformasikan apakah terdapat transaksi merger, akuisisi, atau pengambilalihan yang membutuhkan persetujuan RUPS selama tahun 2016.	<p>Informasi ada atau tidaknya transaksi merger, akuisisi atau pengambilalihan diinformasikan di dalam Laporan Tahunan.</p> <p>Apabila terdapat transaksi (merger, akuisisi atau pengambilalihan) yang membutuhkan persetujuan RUPS, pihak independen ditunjuk untuk mengevaluasi kewajaran nilai atas transaksi tersebut. Informasi ini diungkapkan juga di dalam Laporan Tahunan.</p>
Part B – Equitable Treatment of Shareholders			
6	B.3.2 Are the directors/ commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business	ABM Investama belum mengungkapkan kebijakan yang mengatur kewajiban anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaporkan transaksi saham Perusahaan dalam jangka	Menyusun kebijakan yang mengatur kewajiban anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaporkan transaksi saham

No.	Kriteria	Penjelasan	Rekomendasi
	days?	waktu 3 hari kerja.	<p>Perusahaan dalam jangka waktu 3 hari.</p> <p>Kebijakan tersebut diungkapkan di dalam website Perusahaan dan/atau Laporan Tahunan.</p>
7	B.4.2 Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/ commissioners to review material RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?	<p>ABM Investama belum mengungkapkan kebijakan yang mengatur kewajiban untuk melakukan review atas transaksi dengan pihak berelasi yang material (material RPT) oleh komite Dewan Komisaris.</p> <p>Piagam Komite Audit belum mengatur kewajiban Komite Audit untuk melakukan review atas transaksi dengan pihak berelasi yang material (material RPT).</p>	<p>Menyusun kebijakan yang mengatur kewajiban untuk dilakukan review atas transaksi dengan pihak berelasi yang material (material RPT) oleh komite Dewan Komisaris.</p> <p>Kebijakan tersebut diungkapkan di dalam website Perusahaan dan/atau Laporan Tahunan.</p>
8	B.4.4 Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	ABM Investama belum mengungkapkan kebijakan yang mengatur pinjaman oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	<p>Menyusun kebijakan yang memperbolehkan atau melarang anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk melakukan pinjaman atas nama pribadi kepada Perusahaan.</p> <p>Jika diperbolehkan, perlu diatur bahwa pinjaman tersebut dilakukan secara <i>arm's length basis</i> dan sesuai dengan suku bunga pasar.</p>

No.	Kriteria	Penjelasan	Rekomendasi
			Kebijakan tersebut diungkapkan di dalam website Perusahaan dan/atau Laporan Tahunan.
9	B.5.1 Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	Laporan Tahunan menginformasikan transaksi dengan pihak berelasi ditentukan berdasarkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.	Memastikan seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara <i>fair</i> dan <i>arm's length basis</i> . Informasi tersebut diungkapkan di dalam Laporan Tahunan.
Part C – Role of Stakeholders			
10	C.1.2 Does the company disclose a policy and practice that address: Supplier/contractor selection procedures?	Laporan Tahunan menginformasikan Perusahaan memiliki Vendor Relationship Management Policy dan Goods/Services Procurement Policy, namun hal-hal yang diatur di dalam kedua kebijakan tersebut tidak diungkapkan.	Vendor Relationship Management Policy dan/atau Goods/Services Procurement Policy dipastikan telah mengatur pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan vendor yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi. Kebijakan dan praktik atas proses pemilihan vendor yang mempertimbangkan faktor ekonomi dan non ekonomi diungkapkan di dalam Laporan Tahunan dan/atau website Perusahaan.

No.	Kriteria	Penjelasan	Rekomendasi
11	C.3.3 Does the company have a reward/ compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	<p>ABM Investama belum mengungkapkan kebijakan yang mengatur pemberian penghargaan atau kompensasi selain penghargaan jangka pendek.</p> <p>Laporan Tahunan mengungkapkan bahwa tidak ada program kepemilikan saham oleh karyawan/manajemen yang diselenggarakan oleh ABM Investama di tahun 2016.</p>	Pelaksanaan pemberian penghargaan atau kompensasi, selain penghargaan jangka pendek, yang diberikan kepada karyawan diungkapkan di dalam Laporan Tahunan.
Part D – Disclosure and Transparency			
12	D.1.4 Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	ABM Investama belum mengungkapkan kepemilikan saham oleh pejabat satu tingkat di bawah Direksi.	<p>Dilakukan pengelolaan informasi kepemilikan saham pejabat satu tingkat di bawah Direksi.</p> <p>Kepemilikan saham pejabat satu tingkat di bawah Direksi diungkapkan di dalam website dan/atau Laporan Tahunan.</p> <p>Apabila tidak ada pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang memiliki saham, informasi tersebut juga diungkapkan di dalam website dan/atau Laporan Tahunan.</p>
13	D.2.3 Does the company's annual report disclose the following items:	Laporan Tahunan belum mengungkapkan informasi indikator kinerja non keuangan.	Informasi kinerja non keuangan diungkapkan di dalam Laporan

No.	Kriteria	Penjelasan	Rekomendasi
	Non-financial performance indicators?		Tahunan. Salah satu indikator yang dapat dipertimbangkan untuk diungkapkan adalah customer satisfaction index dan market share.
14	D.2.5 Does the company's annual report disclose the following items: Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of all directors/ commissioners?	Laporan Tahunan telah memuat informasi profil anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Namun, atas profil anggota Direksi, ABM Investama belum menginformasikan jabatan Direksi/Dewan Komisaris di perusahaan lain.	Informasi jabatan Direksi dan/atau Komisaris di perusahaan lain oleh Direksi ABM Investama diungkapkan di dalam Laporan Tahunan.
15	D.2.7 Does the company's annual report disclose the following items: Total remuneration of each member of the board of directors/ commissioners?	Laporan Tahunan telah memuat informasi total remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, namun belum menginformasikan total remunerasi untuk masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	Total remunerasi untuk masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan di dalam Laporan Tahunan.
16	D.3.1 Does the company disclose its policy covering the review and approval of material RPTs?	Perusahaan belum mengungkapkan kebijakan atau prosedur terkait pelaksanaan kajian dan persetujuan atas transaksi dengan pihak berelasi (RPT) yang material.	Kebijakan atau prosedur yang mengatur proses kajian dan persetujuan atas transaksi dengan pihak berelasi yang material diungkapkan di dalam website Perusahaan

No.	Kriteria	Penjelasan	Rekomendasi
			dan/atau Laporan Tahunan.
17	D.4.1 Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?	Perusahaan belum menginformasikan transaksi saham yang dilakukan oleh Direksi selama tahun 2016.	Kepemilikan saham oleh Direksi di awal dan akhir tahun diungkapkan di dalam website Perusahaan dan/atau Laporan Tahunan.
18	D.6.4 Does the company use the following modes of communication? Media briefings/ press conferences	ABM Investama menginformasikan public expose merupakan salah satu media berkomunikasi dengan media, namun dokumen public expose tidak ditemukan di website Perusahaan. Saat ini, ringkasan materi public expose hanya dimuat di dalam website BEI dan hanya dalam bahasa Indonesia.	Materi public expose dalam bahasa Inggris dimuat di dalam website Perusahaan.
Part E – Responsibilities of the Board			
19	E.2.4 Do independent directors/ commissioners make up at least 50% of the board of directors/ commissioners?	Jumlah anggota Komisaris Independen kurang dari 50%.	Memastikan jumlah minimal anggota Komisaris Independen dalam susunan komposisi Dewan Komisaris adalah 50%.
20	E.2.5 Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years ¹ each for its independent directors/ commissioners?	Laporan Tahunan menginformasikan anggota Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang anggota Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya	Pengaturan batasan masa jabatan anggota Komisaris independen disesuaikan dengan ketentuan praktik baik ACGS yaitu maksimal 9 tahun.

No.	Kriteria	Penjelasan	Rekomendasi
	¹ The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	tetap independen kepada RUPS.	
21	E.2.9 Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/ commissioners?	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak terdiri dari mayoritas Komisaris Independen.	Memastikan jumlah anggota Komisaris independen dalam susunan komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah lebih dari 50%.
22	E.2.12 Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	Laporan Tahunan belum mengungkapkan agenda pembahasan pertemuan Komite Nominasi dan Remunerasi. Oleh karenanya, tidak dapat dipastikan terdapat pembahasan mengenai proses nominasi selama tahun 2016.	Memastikan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pertemuan dengan agenda pembahasan nominasi minimal 2x dalam setahun. Agenda pertemuan Komite Nominasi dan Remunerasi diungkapkan di dalam Laporan Tahunan.
23	E.2.14 Is the Remuneration Committee comprised of a majority of independent directors/ commissioners?	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak terdiri dari mayoritas Komisaris Independen.	Memastikan jumlah anggota Komisaris Independen dalam susunan komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah lebih dari 50%.
24	E.2.17 Is the meeting attendance of the Remuneration Committee	Laporan Tahunan belum mengungkapkan agenda pembahasan pertemuan Komite Nominasi dan	Memastikan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan

No.	Kriteria	Penjelasan	Rekomendasi
	disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	Remunerasi. Oleh karenanya, tidak dapat dipastikan terdapat pembahasan mengenai proses remunerasi selama tahun 2016.	pertemuan dengan agenda pembahasan remunerasi minimal 2x dalam setahun. Agenda pertemuan Komite Nominasi dan Remunerasi diungkapkan di dalam Laporan Tahunan.
25	E.3.1 Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year?	ABM Investama belum mengungkapkan jadwal rapat Direksi telah disusun sebelum awal tahun.	Jadwal rapat Direksi disusun sebelum awal tahun. Informasi tersebut diungkapkan di dalam Laporan Tahunan.
26	E.3.4 Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	Board Manual mengatur bahwa rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ jumlah anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi hadir.	Pengaturan kuorum rapat Dewan Komisaris dan Direksi diubah menjadi 2/3 mengacu kepada praktik baik ACGS.
27	E.3.6 Are board papers for board of directors/ commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	Board Manual mengatur bahwa bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 hari sebelum rapat diselenggarakan.	Pengaturan batas waktu penyampaian bahan rapat diubah menjadi paling lambat 5 hari kerja mengacu kepada praktik baik ACGS.
28	E.3.15 Does the company have measurable standards to align the performance-	ABM Investama belum mengungkapkan kebijakan mengenai claw back provision dan deferred bonuses untuk Direksi dan	Menyusun kebijakan yang mengatur claw back provision dan deferred bonuses untuk Direksi dan

No.	Kriteria	Penjelasan	Rekomendasi
	based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?	senior manajemen.	senior manajemen. Kebijakan tersebut diungkapkan di dalam website Perusahaan dan/atau Laporan Tahunan.
29	E.3.18 Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	<p>Laporan Tahunan menginformasikan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Audit Internal dilakukan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>Namun, anggota Dewan Komisaris tidak terdiri dari mayoritas Komisaris Independen. Kriteria ACGS mensyaratkan apabila Dewan Komisaris yang memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal, maka mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p>	Memastikan jumlah minimal anggota Komisaris Independen dalam susunan komposisi Dewan Komisaris adalah 50%.
30	E.3.20 Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the board of directors/ commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk	Laporan Tahunan tidak mengungkapkan kajian atas pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.	Direksi dan Dewan Komisaris melakukan kajian atas pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan. Aktivitas yang dilakukan diungkapkan di dalam Laporan Tahunan.

No.	Kriteria	Penjelasan	Rekomendasi
	management systems?		
31	E.3.22 Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/ commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems?	Laporan Tahunan tidak memuat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kecukupan atau efektifitas pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan.	<p>Direksi dan Dewan Komisaris melakukan kajian atas pengendalian internal dan manajemen risiko Perusahaan serta menyusun pernyataan mengenai kecukupan dan/atau efektifitasnya.</p> <p>Pernyataan kecukupan dan/atau efektifitas pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan oleh Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan di dalam Laporan Tahunan.</p>
32	E.4.2 Is the chairman an independent director/ commissioner?	Komisaris Utama bukan merupakan Komisaris Independen.	ABM Investama melakukan kajian atas persyaratan Komisaris Utama yaitu Komisaris Independen mengacu kepada praktik baik ACGS.
33	E.4.4 Are the role and responsibilities of the chairman disclosed?	ABM Investama belum mengatur tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama.	Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama diungkapkan di dalam website Perusahaan dan/atau Laporan Tahunan.

No.	Kriteria	Penjelasan	Rekomendasi
34	E.4.5 If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	Komisaris Utama bukan merupakan Komisaris Independen dan ABM Investama belum menetapkan pihak yang ditunjuk sebagai Senior Komisaris Independen.	<p>Apabila Komisaris Utama bukan Komisaris Independen, ABM Investama menetapkan pihak yang ditunjuk sebagai Senior Komisaris termasuk tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>Anggota Komisaris yang ditunjuk serta tugas dan tanggung jawabnya diungkapkan di dalam website Perusahaan dan/atau Laporan Tahunan.</p>
35	E.5.2 Does the company have a policy that encourages directors/ commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	<p>Board Manual telah mengatur salah satu tugas Dewan Komisaris dan Direksi adalah meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya secara berkesinambungan untuk menjalankan fungsinya secara profesional.</p> <p>Berdasarkan Laporan Tahunan diketahui terdapat 1 anggota Dewan Komisaris yang tidak mengikuti pelatihan/workshop untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya selama tahun 2015.</p>	<p>Memastikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya setiap tahun.</p> <p>Informasi pelatihan yang diikuti oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam website Perusahaan dan/atau Laporan Tahunan.</p>
36	E.5.7 Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the	Laporan Tahunan menginformasikan proses dan kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris. Namun, belum menginformasikan penilaian	Memastikan penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris telah dilakukan dan pelaksanaan penilaian tersebut

No.	Kriteria	Penjelasan	Rekomendasi
	criteria and process followed for the assessment	kinerja Komite telah dilakukan di tahun 2016.	diungkapkan di dalam Laporan Tahunan.
Bonus			
37	(B) A.1.1 Does the company practice secure electronic voting in absentia at the general meetings of shareholders?	ABM Investama belum menggunakan secure electronic voting apabila Pemegang Saham tidak dapat hadir di dalam rapat Pemegang Saham.	Melakukan kajian untuk penggunaan secure electronic voting apabila pemegang saham tidak dapat hadir di dalam rapat Pemegang Saham. Melakukan koordinasi dengan regulator (OJK dan BEI) atas penggunaan secure electronic voting.
38	(B) B.1.1 Does the company release its notice of AGM (with detailed agendas and explanatory circulars), as announced to the Exchange, at least 28 days before the date of the meeting?	ABM Investama menyampaikan pengumuman RUPS 22 hari sebelum pelaksanaan RUPS.	Pengumuman RUPS disampaikan paling lambat 28 hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS.
39	(B) C.1.1 Does the company adopt an internationally recognized reporting framework for sustainability (ie GRI, Integrated Reporting, SASB)?	ABM Investama belum menyusun laporan keberlanjutan (sustainability report).	Melakukan penyusunan laporan keberlanjutan yang mengacu kepada framework yang ada diantaranya GRI G4.
40	(B) D.1.1 Are the audited financial report/statement released within 60 days from the financial year end?	ABM Investama menginformasikan laporan keuangan yang telah diaudit pada tanggal 31 Maret 2017 (lebih dari 60 hari) di Media Indonesia.	Laporan keuangan yang telah diaudit dipublikasikan di media paling lambat 60 hari setelah akhir tahun buku.

No.	Kriteria	Penjelasan	Rekomendasi
41	(B) D.1.2 Does the company disclose details of remuneration of the CEO?	ABM Investama tidak mengungkapkan detail remunerasi yang diterima oleh Direktur Utama.	Detail remunerasi yang diterima oleh Direktur Utama diungkapkan di dalam Laporan Tahunan.
42	(B) E.1.1 Does the company have at least one female independent director/ commissioner?	ABM Investama tidak memiliki Komisaris Independen wanita.	Memastikan terdapat Komisaris Independen wanita dalam komposisi Dewan Komisaris.
43	(B).E.2.1 Is the Nominating Committee comprise entirely of independent directors/ commissioners?	Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak terdiri dari Komisaris Independen.	Memastikan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari Komisaris Independen.
44	(B) E.2.2 Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of the directors aligned with the company's strategic directions?	ABM Investama belum mengungkapkan proses nominasi yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dalam mengidentifikasi calon Direksi sesuai dengan strategi perusahaan.	Memastikan proses nominasi calon Direksi yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi telah mempertimbangkan strategi perusahaan. Proses nominasi yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi diungkapkan di dalam Laporan Tahunan.
45	(B).E.3.1 Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases	ABM Investama belum mengungkapkan penggunaan pihak eksternal (professional search firm) dalam proses identifikasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Menggunakan pihak eksternal (professional search firm) dalam membantu proses identifikasi calon anggota Direksi

No.	Kriteria	Penjelasan	Rekomendasi
	set up by director or shareholder bodies) when searching for candidates to the board of directors/ commissioners?		<p>dan/atau Dewan Komisaris.</p> <p>Penggunaan pihak eksternal dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diungkapkan di dalam website Perusahaan dan/atau Laporan Tahunan.</p>
46	(B).E.4.1 Do independent non-executive directors/ commissioners make up more than 50% of the board of directors/ commissioners for a company with independent chairman?	Jumlah anggota Komisaris Independen kurang dari 50% dan Komisaris Utama bukan merupakan komisaris independen.	Memastikan Komisaris Utama adalah Komisaris Independen dan jumlah anggota Komisaris Independen dalam komposisi Dewan Komisaris adalah lebih dari 50%.
47	(B).E.5.1 Does the board describe its governance process around IT issues including disruption, cyber security, disaster recovery, to ensure that all key risks are identified, managed and reported to the board?	ABM Investama belum mengungkapkan efektifitas pengelolaan TI.	<p>Memastikan kebijakan TI telah disusun, terdapat pembahasan TI di dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris, dan telah dilakukan kajian atas efektifitas pengelolaan TI.</p> <p>Informasi tersebut diungkapkan dalam Laporan Tahunan.</p>
48	(B) E.6.1 Does the company have a separate board level Risk Committee?	ABM Investama belum memiliki komite risiko di bawah Dewan Komisaris.	Membentuk komite risiko di bawah Dewan Komisaris.

No.	Kriteria	Penjelasan	Rekomendasi
Penalty			
49	(P) A.5.1 Is a pyramid ownership structure and/or cross holding structure apparent?	Laporan Tahunan menunjukkan adanya struktur kepemilikan piramid (pyramid ownership structure).	Melakukan kajian atas adanya struktur kepemilikan piramid saat ini untuk memastikan pemegang saham minoritas terlindungi haknya.

2.1.5. Peraturan OJK atas Kriteria ACGS Yang Belum Dipenuhi

Berdasarkan hasil review dan diskusi dengan counterpart ABM Investama, diketahui terdapat beberapa kriteria ACGS yang belum dipenuhi oleh ABM Investama dikarenakan ABM Investama mengacu kepada peraturan OJK saat ini, yaitu:

Tabel 5. Peraturan OJK atas kriteria ACGS yang belum dipenuhi

No.	Kriteria	Peraturan OJK
1	E.2.4 Do independent directors/ commissioners make up at least 50% of the board of directors/ commissioners?	POJK nomor 33/POJK.04/2014 pasal 20 ayat 3 menyatakan “Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.”
2	E.2.5 Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years ¹ each for its independent directors/ commissioners? ¹ The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.	POJK nomor 33/POJK.04/2014 pasal 25 ayat 1 menyatakan “Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.”
3	E.2.9 Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/ commissioners?	POJK nomor 34/POJK.04/2014 pasal 3 ayat 1 menyatakan “Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri

No.	Kriteria	Peraturan OJK
	<p>dan</p> <p>E.2.14 Is the Remuneration Committee comprised of a majority of independent directors/commissioners?</p>	<p>dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; • anggota lainnya yang dapat berasal dari: anggota Dewan Komisaris; pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.”
4	E.3.6 Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	POJK nomor 33/POJK.04/2014 pasal 17 ayat 2 menyatakan “Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.”
5	E.4.2 Is the chairman an independent director/commissioner?	<p>POJK nomor 33/POJK.04/2014 pasal 20 yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayat 1 menyatakan “(1) Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. • Ayat 2 menyatakan”Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. • Ayat 4 menyatakan “1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.”

